

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu hal utama yang dihadapi oleh negara Indonesia, dengan permasalahan yang beragam (Redana & Suprpta, 2022). Masalah kemiskinan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini tidak hanya mencakup kendala ekonomi seperti rendahnya tingkat pendapatan dan akses terhadap pekerjaan layak, tetapi juga masalah sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang meruncing di beberapa wilayah.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tingkat pengangguran, pendapatan yang rendah, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta kondisi geografis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per Maret 2023. Persentase penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tersebut mencapai 11,04 persen yaitu sebanyak 448,47 ribu penduduk. Meskipun DIY menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa, namun tingkat kebahagiaan penduduknya tinggi.

Ketimpangan kemampuan ekonomi di kalangan masyarakat menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan, yang menyebabkan sebagian masyarakat sulit untuk terlibat dalam proses pembangunan atau tidak dapat

menikmati hasil dari upaya pembangunan tersebut (Nurdiawan dkk., 2022). Pergerakan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan seringkali menyebabkan ketimpangan. Kantong-kantong kemiskinan sering muncul di pedesaan karena pertumbuhannya cenderung lebih lambat dibandingkan perkotaan. Kemiskinan muncul ketika masyarakat tidak mampu mendapatkan pendapatan yang memadai, memiliki akses pendidikan yang terbatas, dan menghadapi masalah kesehatan yang serius. Penting untuk menanggulangi kemiskinan ini dengan segera untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini mendorong banyak penduduk desa untuk bermigrasi ke perkotaan demi mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, penting untuk dicatat bahwa desa memiliki potensi besar dalam sumber daya yang bisa dioptimalkan. Selain masalah kemiskinan, pengangguran juga menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Salah satu solusi penting untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di DIY, pemerintah daerah memiliki beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan pengembangan kewirausahaan atau UMKM. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2022 terdapat sekitar 8,71 juta unit usaha di Indonesia, yang memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional. UMKM adalah sektor penting dalam perekonomian Indonesia yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada perekonomian nasional dan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Menurut kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tercatat, Jawa Barat menjadi juara UMKM dengan jumlah 1,49 juta unit usaha. Tipis di urutan kedua ada Jawa Tengah yang mencapai 1,45 juta unit. Ketiga, ada Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit. Perbandingan cukup jauh, DKI Jakarta yang berada di posisi keempat bisa menorehkan hampir 660 ribu unit. Sedangkan DIY menduduki posisi terendah di antara provinsi-provinsi yang ada di pulau jawa yaitu hanya mencapai 235.899 unit usaha.

Perencanaan pembangunan masyarakat akan berperan aktif menjadi salah satu bentuk *stakeholder* yang penting dan akan dilibatkan sebagai bentuk pemerataan lingkungan serta perencanaan pembangunan daerah masing-masing. Salah satu peran masyarakat sebagai *stakeholder* dalam pembangunan yaitu menjadi wirausahawan. Wirausahawan ini akan menjadi batu loncatan untuk menunjang tujuan utama dari pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa pentingnya usaha dan bekerja keras dalam berwirausaha sehingga akan memperoleh rezeki guna untuk merubah kehidupan mereka agar lebih baik. Sebagaimana pada ayat suci Al-Qur'an dalam Surah Al-Jumuah ayat 10 Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT menerangkan bahwa setelah selesai melakukan sholat, umat islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan dan lain sebagainya. Ayat tersebut dapat diinterpretasikan dalam konteks kewirausahaan, sebagai dorongan untuk umat islam guna menjalankan aktivitas ekonomi dan berusaha mencari rezeki yang halal setelah menunaikan kewajiban agama mereka, seperti shalat jumat. Namun, dalam menjalankan usaha tersebut, mereka diminta untuk senantiasa mengingat Allah dan menghindari segala bentuk kecurangan, dan praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan keadilan sangat penting dalam kewirausahaan. Menjaga kesadaran akan Allah dalam setiap langkah bisnisnya dapat membimbing seorang wirausahawan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat secara luas.

Mencari rezeki yang halal, seorang wirausahawan juga diharapkan untuk mengembangkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta memastikan bahwa proses produksi dan distribusinya tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Dengan demikian, nilai-nilai agama dalam kewirausahaan dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang

etis, berkelanjutan, dan memberikan manfaat positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Sasaran utama pembangunan seringkali dapat tercapai melalui peran kuat wirausahawan, terutama dalam mengembangkan UMKM. UMKM menjadi pendorong motivasi dan pusat inovasi bagi pertumbuhan ekonomi. Peran yang dimainkan oleh UMKM sangatlah penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Banyak dari UMKM ini berlokasi di pedesaan karena disana terdapat perekonomian yang masih berkembang dan tingkat pendidikan masyarakatnya yang cenderung lebih rendah.

Pergerakan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan seringkali menyebabkan ketimpangan. Kantong-kantong kemiskinan sering muncul di pedesaan karena pertumbuhannya cenderung lebih lambat dibandingkan perkotaan. Fenomena ini mendorong banyak penduduk desa untuk bermigrasi ke perkotaan demi mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, penting untuk dicatat bahwa desa memiliki potensi besar dalam sumber daya yang bisa dioptimalkan. masyarakat desa bisa mengembangkan potensi lokal, seperti pertanian, kearifan lokal, kerajinan, pariwisata, atau sumber daya alam lainnya sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik dan adanya dukungan infrastruktur serta pendidikan yang memadai, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ini juga bisa membantu mengurangi tekanan urbanisasi serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi masyarakat desa.

Masyarakat desa yang memiliki ketahanan terhadap tantangan dapat menjadi fondasi awal bagi lahirnya seorang wirausaha desa. Salah satu kualitas kunci dari seorang wirausaha yang sukses adalah kemauan untuk bekerja keras dan memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai rintangan. Mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat desa merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kewirausahaan akan menjadi strategi untuk pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dimana sumber daya serta fasilitas disediakan secara spontan oleh masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi pedesaan (Ansari dkk., 2013).

Keberadaan UMKM memiliki dampak positif yang signifikan pada perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk lebih mengembangkan eksistensi UMKM. UMKM dapat menjadi titik awal dalam pengembangan usaha yang sinergis dengan pertumbuhan usaha masyarakat. Ada program-program yang mendukung pengembangan usaha ini melalui pemberian pendampingan dan pelatihan untuk perkembangan lebih lanjut. Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi masyarakat di suatu negara dapat membantu mengatasi masalah ekonomi makro seperti pengangguran, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan inovasi (Rizky dkk., 2022). Sejak saat itu, telah tercipta berbagai produk baru yang memberikan manfaat dan peluang bagi masyarakat lain untuk membuka usaha baru lainnya. Kehadiran UMKM bukan hanya meningkatkan pendapatan namun pula pada pemerataan

pendapatan. Hal ini mampu dimengerti lantaran sektor UMKM melibatkan banyak pihak dengan berbagai macam usaha.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pertumbuhan UMKM di wilayahnya. Dorongan dan penguatan terus-menerus pada UMKM sangatlah penting untuk bersama-sama membangun perekonomian lokal. Pertumbuhan UMKM yang meluas di berbagai desa merupakan fokus penting yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena hal ini memiliki potensi besar sebagai kunci peningkatan perekonomian lokal. Pertumbuhan ekonomi di desa tercermin dari kemajuan UMKM yang dijalankan oleh masyarakat, memungkinkan perkembangan individual yang lebih mandiri. Perkembangan ini terjadi saat masyarakat menggali potensi dan kemampuan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Namun, pendampingan dari tenaga ahli dalam pengembangan kelompok swadaya menjadi hal penting. Kelompok ini sudah memiliki keahlian khusus dalam bidangnya serta telah menguasai pendidikan dan pelatihan.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan kolaborasi dengan tenaga ahli yang menjadi mitra atau fasilitator bagi pengembangan usaha masyarakat. Fasilitator ini berperan sebagai konsultan yang memberikan pengetahuan mengenai modal, pemasaran, pelatihan, jaringan relasi, dan cara memperluas pasar dalam mengembangkan usaha. Upaya untuk mendorong kehidupan wirausaha di desa adalah mengembangkan program kegiatan yang memiliki dimensi menggali potensi *entrepreneur spirit* pada tataran desa. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui penguatan UMKM yang sudah ada di

masyarakat, sehingga mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dalam masyarakat adalah program yang dikenal sebagai Desa Preneur. Menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur menjelaskan Desa Preneur adalah desa atau kalurahan yang memiliki kemampuan untuk menggeliatkan dinamika wirausaha ekonomi berbasis potensi maupun kearifan lokal, melalui unit usaha untuk dapat dikelola menjadi berkualitas global dengan penguatan kapasitas komunitas masyarakat secara berkelanjutan. Program Desa Preneur merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Desa Preneur sudah dijalankan Pemda DI Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan UKM sejak tahun 2016 dengan berbagai model/pendekatan, yaitu Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur dan K45PAK (Kiblat Papat Lima Pancer Adiluhung Kawentar) di berbagai desa/kalurahan. Mulai tahun 2021 ada dua model pendekatan tambahan, yaitu Giriloji (Gemah Ripah Loh Jinawi) dan juga Blangkon (Bermuatan Lokal, Bersaing Global, dan Berbasis Komunal) (Wicaksana, 2023).

Program Global Gotong Royong Tetrapreneur (G2RT) menekankan pada adanya proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Program G2RT memungkinkan terbentuknya produk/usaha akan

berkelanjutan dan menjadi bagian usaha BUMDes serta akan ditetapkan sebagai produk/usaha unggulan desa yang akan menjadi Icon Global atau merupakan produk unggulan desa secara global yang akan dikenal oleh pasar dunia karena saat ini terdapat program prioritas yang ditetapkan pemerintah dan menjadi fokus desa yaitu: menentukan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), mengembangkan BUMDes (Sandjojo, 2017).

Pengembangan Desa Preneur Model K45PAK, K45PAK merupakan kependekan dari Kiblat 4-5 Pancer Adiluhung Kawentar. K45PAK merupakan model pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang merupakan pancer atau pusat yang berfungsi sebagai etalase dan inkubator bisnis yang berkiblat/berpedoman pada 4 hal yaitu *Global Value, Local Wisdom, Local Supply Chain* dan *Community Development*. Konsep desa mandiri budaya adalah pola pengembangan pedesaan berbasis konsep terintegrasi mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan supporting system (Kurniawan & Ridhawati, 2017). Manfaat dari desa yang telah mandiri, adalah berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja, meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa, meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, serta menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota (Fatmawati dkk., 2019).

Konsep Desa Preneur mengacu pada inisiatif yang mendukung kewirausahaan di desa atau daerah pedesaan. Keunggulan dari konsep Desa Preneur adalah Pengembangan Ekonomi Lokal, Desa Preneur dapat membantu mengembangkan ekonomi lokal di daerah pedesaan dengan memberikan kesempatan kerja dan membantu pengusaha lokal dalam mengembangkan usaha mereka. Pemberdayaan Masyarakat, Inisiatif Desa Preneur biasanya melibatkan pelatihan dan pendidikan bagi penduduk setempat, sehingga mereka dapat memulai atau mengembangkan bisnis mereka sendiri. Hal ini meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Desa Preneur dikembangkan dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pengembangan dinamika *entrepreneurship* dan membantu pengentasan kemiskinan serta mengurangi pengangguran, melalui pengembangan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan (Dewiyanti & Wijaya, 2022). Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Pembangunan di desa pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Preneur dilakukan untuk pengembangan potensi usaha, peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas SDM para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu, dengan prioritas pada peningkatan softskill dari para pelaku usaha, Program Desa Preneur terwujud dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi, dan Pendampingan.

Menurut Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023, sebanyak 75 desa atau kalurahan telah menjalankan Program Desa Preneur. Program ini berlangsung secara bertahap selama minimal tiga tahun yang dimulai dari tahun 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur, terdapat tiga tahapan utama pelaksanaan. Tahap pertama adalah tahap embrio atau penumbuhan, dimana dilakukan pengenalan potensi desa, sosialisasi tentang manajemen usaha, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk dan pemahaman pasar. Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan, dimana fokusnya adalah mengembangkan usaha melalui strategi pemasaran yang efektif seperti branding, pemasaran, daya saing, dan sertifikasi produk. Tahap terakhir adalah tahap maju, di mana program dianggap berhasil jika mampu memperluas jaringan kemitraan, mengurangi angka kemiskinan, dan mengurangi pengangguran.

Evaluasi atau pembinaan setelah tahun keempat pelaksanaan Program Desa Preneur merupakan tahapan berikutnya, dimana evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui dampak usaha terhadap perekonomian desa dan kelangsungan usaha, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan selanjutnya. Penilaian keberhasilan Program Desa Preneur menggunakan desa atau kalurahan yang telah berhasil meraih predikat maju selama tiga tahun sebagai indikator kesuksesan program.

Terdapat sebanyak 17 desa atau kalurahan telah memperoleh predikat maju sebagai hasil dari evaluasi tersebut.

Keberhasilan Program Desa Preneur dinilai berdasarkan sejauh mana program tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, sejauh mana sumber daya manusia tertarik untuk berwirausaha, manfaat yang diperoleh dari program, dan sejauh mana implementasi program sesuai dengan rencana awal. Ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas strategi yang diterapkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan wirausaha, dampak positif yang dirasakan oleh peserta program, serta kesesuaian antara rencana awal dengan realisasi program di lapangan. Keberhasilan program juga dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, peningkatan keterampilan dan pengetahuan wirausaha, serta kemampuan desa dalam memanfaatkan potensi lokal untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2022) yang berjudul “Evaluasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Bantul”. Hasilnya menunjukkan bahwa Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, belum berjalan sesuai dengan tujuan. Ini ditunjukkan oleh beberapa hal usaha produktif yang dijalankan oleh kelompok afinitas tidak bertahan lama, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan sumber daya input, dan program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan sumber daya lokal Desa Ngadiwarno.

Studi sebelumnya, Fahmi dkk (2021) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Lingkungan Lopag Gede Kota Serang. Dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*context, input, process, product*) dimana hasil penelitian Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dijalankan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Serang telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Program ini telah memberikan bantuan yang dikelola dengan baik oleh masyarakat penerima sehingga membantu mereka dalam mengelola usaha. Selain itu, program ini juga berhasil mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Nursanty dkk (2022) yang berjudul *Metode Context, Input, Process, Dan Product Dalam Evaluasi Program Kerja BUMDes Desa Sunda Kelapa*. Dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*context, input, process, product*) dimana hasil penelitian kegiatan yang dilakukan adalah masih minimnya pemahaman pengelola BUMDes dalam memaksimalkan tujuan dari adanya BUMDes itu sendiri. Selama ini evaluasi yang dilakukan oleh pengelola hanya sebatas evaluasi dari pelaksanaan program unit usaha BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamim dkk (2020) yang berjudul judul Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah di Kota Tasikmalaya. Dengan menggunakan model evaluasi CIPP

(*context, input, process, product*) dimana hasil penelitian Program Bank Sampah sudah berjalan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun sosialisasi yang belum menyeluruh, sarana dan prasarana yang belum memadai, Kegiatan program sudah baik, dilihat dari adanya jadwal yang rutin yaitu 1 minggu sekali pada hari rabu, pemanfaatan sarana dan prasarana digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan memberikan dampak yang positif yaitu dapat mendaur ulang sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, perlu dilakukan penyusunan mengenai Evaluasi Program Desa Preneur di Daerah Istimewa Yogyakarta Di Desa/Kalurahan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Program Desa Preneur telah berjalan sesuai, dengan tujuan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat desa khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar program yang telah dibentuk oleh pemerintah dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan mengevaluasi Program Desa Preneur yang berlokasi di 17 Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) menggunakan indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, kualitas sumberdaya manusia, kegiatan dan manfaat yang telah diperoleh dalam pelaksanaan Program Desa Preneur di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana tingkat keberhasilan Program Desa Preneur dalam mencapai tujuan program?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan Program Desa Preneur dan masukan yang diperlukan?
3. Bagaimana pelaksanaan Program Desa Preneur telah dilaksanakan dan implementasi yang harus diperbaiki?
4. Bagaimana capaian yang di dapat masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Preneur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Desa Preneur di Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang belum tercapai dan tujuan yang diinginkan.
2. Untuk menganalisis tentang kesesuaian Program Desa Preneur yang telah ditetapkan dan masukan yang diperlukan.
3. Untuk menganalisis sejauh mana program telah dilaksanakan dan komponen apa saja yang harus diperbaiki dalam pengimplementasiannya.
4. Untuk menganalisis capaian yang didapat masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Preneur.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi peneliti terkait pelaksanaan Program Desa Preneur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penulis akan mendapatkan pengalaman berharga dari implementasi langsung teori yang telah diperoleh dalam konteks nyata, terutama dalam pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan masyarakat dan ekonomi lokal. Dengan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program tersebut, penulis akan memiliki kesempatan untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana teori-teori pembangunan dapat diaplikasikan dalam situasi praktis.

2. Bagi Fakultas.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dan bahan rujukan bagi mahasiswa dan peneliti lainnya yang tertarik untuk melanjutkan penelitian dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan program-program pembangunan di DIY.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah atau lembaga terkait, terutama dalam keunggulan dan kelemahan Program Desa Preneur yang telah

dilaksanakan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan dan program-program pembangunan yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

4. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat DIY, khususnya bagi masyarakat yang berada di tingkat desa. Dengan mengevaluasi capaian dan pelaksanaan Program Desa Preneur, masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan keterampilan berwirausaha.